

PENERAPAN AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH DAN HIWALAH BI AL-UJRAH DALAM PENGEMBANGAN PRODUK DI PERBANKAN SYARIAH

Muhamad Izazi Nurjaman¹, Iwan Setiawan², Nana Herdiana³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Corresponding email: muhamadizazinurjaman@gmail.com

Article History

Received: 12 October 2021 Revised: 13 January 2022 Accepted: 1 February 2022

Abstract

The innovation of Islamic banking products requires the use of multi-contracts which transform the tabarru' contract which incidentally is a non-commercial contract into a mu'awadhat contract whose purpose is for commercial activities. So that it raises a debate about the legal status of the profits generated from the contract and how it is applied in product development in Islamic banking. These contracts are the wakalah bi al-ujrah contract and the hiwalah bi al-ujrah contract. This study uses a descriptive literature method that uses a normative juridical approach with data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation and drawing conclusions. This type of research is qualitative research. The results of this study reveal the fact that the application of the wakalah bi al-ujrah contract and the hiwalah bi al-ujrah contract in product development in Islamic banks is contained in the mechanism for implementing the functions of Islamic banks in providing services. As for the services provided, the nature of the legal norms is the same as the service ijarah contract which is included in the category of core contract (mu'awadhat) of Islamic banks for profit.

Keywords: *Wakalah bi al-ujrah, Hiwalah bi al-ujrah, Products, and Islamic Banks*

JEL Classification: *G2, G21*

Abstrak

Inovasi produk Perbankan Syariah mengharuskan adanya penggunaan multi akad yang mentransformasikan akad *tabarru'* yang notabene sebagai akad tanpa komersil menjadi akad *mu'awadhat* yang tujuannya untuk kegiatan komersil. Sehingga menimbulkan perdebatan mengenai status hukum atas keuntungan yang dihasilkan dari akad tersebut serta bagaimana penerapannya dalam pengembangan produk di perbankan syariah. Akad tersebut adalah akad *wakalah bi al-ujrah* dan akad *hiwalah bi al-ujrah*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kepustakaan yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis data berupa reduksi data, sajian data dan menarik kesimpulan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa penerapan akad *wakalah bi al-ujrah* dan akad *hiwalah bi al-ujrah* dalam pengembangan produk di bank syariah, terdapat dalam mekanisme pelaksanaan fungsi bank syariah dalam melakukan pelayanan jasa. Adapun pelayanan jasa

yang diberikan, hakikat norma hukumnya sama dengan akad *ijarah* jasa yang masuk dalam kategori akad inti (*mu'awadhat*) bank syariah untuk mendapatkan keuntungan.

Kata Kunci: Wakalah bi al-ujrah, Hiwalah bi al-ujrah, Produk, dan Bank Syariah
Klasifikasi JEL: G2, G21

1. LATAR BELAKANG

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan sebuah lembaga yang sistem operasionalnya bergerak di bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah menjadi legitimasi bagi LKS dalam rangka menghilangkan berbagai transaksi yang dilarang dalam Islam (Mardani, 2015). Penggunaan akad menjadi salah satu pembeda antara LKS dan LKK (lembaga keuangan Konvensional), karena akad yang digunakan LKS dalam penawaran produk menjadi salah satu penentu LKS mendapatkan keuntungan (Dolgun et al., 2019).

Akad *mu'awadhat* menjadi mayoritas akad yang banyak digunakan LKS dalam klausula perjanjiannya terkhusus di perbankan syariah dibanding dengan akad *tabarru'*. Karena akad *mu'awadhat* merupakan akad yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Mubarak dan Hasanudin, 2017). Hal itu selaras dengan kedudukan bank syariah yang sistem operasionalnya mengarahkan kepada pelayanan jasa dalam rangka mendapatkan keuntungan. Variasi akad *mu'awadhat* yang digunakan membuat keuntungan yang didapatkan bank syariah pun bermacam-macam, yaitu keuntungan dari margin akad jual beli, *ujrah* dari akad *ijarah* dan bagi hasil dari akad kerjasama. Adapun dalam perkembangannya inovasi produk mengharuskan adanya penggunaan multi akad, yaitu penggunaan beberapa akad (dua akad atau lebih) yang memiliki satu kesatuan yang terintegrasi. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan produk pemasaran, kepuasan nasabah dan pendapatan (Yozika & Khalifah, 2017).

Menurut Siti Kholijah (2020), bahwa penggunaan akad secara tunggal sudah tidak mampu merespon perkembangan dan kebutuhan transaksi yang dilakukan bank syariah. Maka multi akad dianggap menjadi solusi akad unggulan dalam merespon perkembangan dan kebutuhan tersebut. Hal itu senada dengan yang dipaparkan oleh Yunus (2019) bahwa untuk merespon perkembangan dan kebutuhan transaksi diperlukan inovasi multi akad yang tetap memiliki kesesuaian dengan kaidah syariah.

DSN-MUI sebagai lembaga independen dalam melegitimasi produk yang akan ditawarkan bank syariah (Nurjaman & Ayu, 2021), membolehkan multi akad dilakukan dalam penawaran produk tersebut dengan memperhatikan batasan dan ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Hal itu dapat dilihat dari beberapa substansi fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Misalnya dalam pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *murabahah*, pihak bank syariah membutuhkan akad *wakalah*. Karena bank syariah memberi kuasa kepada pihak lain

atau kepada nasabah sendiri untuk menjadi *wakil* bank syariah menyediakan barang sesuai dengan pesanan nasabah sebelum terjadinya akad. Maka dalam mekanisme pelaksanaan multi akad tersebut, terdapat dua kedudukan akad yaitu akad *mu'awadhat* (*murabahah*) sebagai akad pokok dan akad *tabarru'* (*wakalah*) sebagai akad *accessoir* (pelengkap) (Anwar, 2007).

Pengembangan inovasi produk tidak hanya terdapat dalam mekanisme bank syariah menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana saja, melainkan pengembangan inovasi juga terdapat pada produk pelayanan jasa. Hal itu dapat dilihat dari terbitnya fatwa DSN-MUI yang menjadikan adanya transpormasi kedudukan akad *tabarru'* menjadi akad *mu'awadhat*. Fatwa yang dimaksud adalah fatwa yang berkaitan dengan akad *wakalah bi al-ujrah* dan akad *hiwalah bi al-ujrah*. Kedua akad ini terdapat dalam beberapa fatwa yang mengharuskan adanya konsep multi akad dalam pengembangan produk bank syariah. Sehingga atas pelayanan jasa yang menggunakan kedua akad tersebut, bank syariah berhak mendapatkan *ujrah* yang dapat dicatat sebagai keuntungan.

Berdasarkan pemaparan di atas, kedudukan bank syariah selalu menggunakan akad *mu'awadhat* dalam mekanisme sistem operasional penawaran produknya. Hal itu dilakukan tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun dalam hal keuntungan yang berasal dari akad *tabarru'* yang memiliki sifat sosial/tolong menolong terhadap konsep multi akad yang dilakukan, perlu dibahas secara detail dan mendalam, mana keuntungan yang boleh dan mana keuntungan yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan, apalagi mentranspormasikan kedudukan akadnya menjadi akad *mu'awadhat*. Maka dari itu, penelitian ini mencoba membedah kedudukan akad *wakalah bi al-ujrah* dan akad *hiwalah bi al-ujrah* serta bagaimana pengimplementasian kedua akad tersebut dalam produk bank syariah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dan khazanah keilmuan yang memberikan kejelasan serta kepastian hukum yang berkaitan dengan penerapan akad *wakalah bi al-ujrah* dan akad *hiwalah bi al-ujrah* terhadap pengembangan produk di perbankan syariah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Transpormasi Akad Wakalah Menjadi Akad Wakalah bi al-Ujrah

Definisi akad *wakalah* dapat ditinjau dari dua aspek yaitu secara kebahasaan dan peristilahan. Akad *wakalah* secara bahasa dimaknai sebagai *al-hifzh* (melindungi) dan *al-tafwidz* (menyerahkan). Sedangkan secara istilah, *wakalah* dimaknai sebagai penyerahan sesuatu kepada pihak lain atas kedudukan dirinya untuk melakukan perbuatan hukum yang diketahui dan dibolehkan oleh ketentuan syara' (Mubarok & Hasanudin, 2017).

Akad *wakalah* boleh dilakukan sebagaimana merujuk Qs. Al-Kahfi: 19 mengenai

cerita *Ashabul Kahfi* yang dibangkitkan dari tidurnya dan saling bercakap. Kemudian memerintah salah satu di antara mereka untuk pergi ke kota membawa uang untuk dibelikan makanan. Hal itu sesuai dengan hadits riwayat Abu Hurairah mengenai cerita Rasulullah SAW yang ditagih utang oleh seorang laki-laki dan memerintahkan para sahabat untuk membayar utangnya dengan mencarikan seekor unta muda (Al-Syaukani, 2001). Sedangkan menurut Ijma ulama, Umat Islam menyepakati bolehnya akad *wakalah* untuk dilakukan, karena bagian dari tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa sesuai Qs. al-Maidah: 2.

Selain dasar hukum yang menjadi patokan dibolehkannya akad *wakalah*, syarat dan rukunnya juga harus terpenuhi. Syarat akad *wakalah* selalu berdampingan dengan rukunnya. Rukun akad *wakalah* terdiri dari: Pertama, *al-muwakkil* yaitu pihak yang mewakilkan atau pihak yang memberi kuasa. Kedua, *wakil* yaitu pihak yang menerima kuasa. Syarat umum bagi kedua subjek hukum tersebut adalah cakap hukum dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum *wakalah*. Ketiga, *shigat al-aqd* (ijab qabul). Syarat dari ijab qabul adalah menggunakan kalimat yang menunjukkan adanya kejelasan dan ridanya para pihak melakukan akad *wakalah*. Selain itu juga, akad yang dilakukan memiliki kedudukan yang efektif. Artinya bersifat kedepan *wakil* melakukan perbuatan hukumnya. Keempat, objek *wakalah* yaitu perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh *wakil* atas nama *muwakkil*. Syarat objek akad ini adalah diketahui secara jelas, objek akad harus merupakan perbuatan hukum yang tidak dilarang serta dapat diwakilkan menurut syariah (DSN-MUI, 2020).

Berdasarkan pemaparan di atas, akad *wakalah* memiliki kedudukan sebagai akad *tabarru'* dalam kategori meminjamkan jasa (Anwar, 2007). Sifatnya hanya menolong orang yang tidak bisa melakukan sesuatu perbuatan hukum atau *muwakkil* ini bisa melakukannya namun terkendala oleh situasi dan kondisi. Di bank syariah, akad ini digunakan dalam rangka sarana pelengkap akad *mu'awadhat* tanpa adanya pengambilan keuntungan dari akad yang dilakukan Namun seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah yang semakin menggeliat mengharuskan adanya transformasi akad *wakalah* yang kedudukannya sebagai akad *tabarru'* menjadi akad *wakalah* yang kedudukannya sebagai akad *mu'awadhat* atau yang disebut dengan *wakalah bi al-ujrah*.

Wakalah bi al-ujrah dimaknai sebagai akad *wakalah* yang disertai dengan

pemberian imbalan berupa *ujrah* atas perbuatan hukum yang dilakukan *wakil*. Mayoritas ulama membolehkan akad *wakalah bi al-ujrah* untuk dilakukan. Seperti menurut Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa akad *wakalah* boleh dilakukan, baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Argumennya adalah adanya hadits-hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mewakilkan kepada beberapa sahabatnya untuk melakukan suatu perbuatan hukum, seperti hadits tentang mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, mewakilkan kepada Urwah untuk membeli kambing, dan mewakilkan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah. Mewakilkan semua perbuatan hukum tersebut tanpa memberikan imbalan. Namun ada juga hadits riwayat Busr bin Sa'id yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka (Al-Maqdisi, 1998). Hadist riwayat Busr bi Sa'id ini juga dijadikan argumen Imam Syaukani bahwa *wakalah* boleh juga dilakukan dengan imbalan (Al-Syaukani, 2001). Adapun menurut Wahbah al-Zuhaili akad *wakalah* sah dilakukan, baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Argumennya adalah karena umat Islam membutuhkan akad tersebut.

Maka dari itu, penerapan akad *wakalah bi al-ujrah* di bank syariah sesuai dengan kedudukan bank syariah sebagai lembaga penyedia jasa keuangan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Akad *wakalah bi al-ujrah* memiliki kedudukan sebagai akad pokok maupun sebagai akad pelengkap. Apabila kedudukan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagai akad pokok, maka secara konvensional akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan dalam produk pelayanan jasa. Sedangkan apabila kedudukan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagai akad pelengkap, maka kedudukan akad *wakalah bi al-ujrah* secara konvensional sebagai sarana yang melengkapi akad *mu'awadhat* dalam mekanisme produk penyaluran dana. Sehingga bank syariah tidak hanya mendapatkan keuntungan dari akad pokok inti melainkan dari *ujrah* akad *wakalah bi al-ujrah* sebagai sarana pelengkap akad yang dilakukan.

2.2 Transpormasi Akad Hiwalah Menjadi Akad Hiwalah bi al-Ujrah

Hiwalah secara bahasa memiliki makna berpindah (*al-intiqal*) atau memindahkan (*al-tahwil*) (Sudiarti, 2018). Selain itu juga, *hiwalah* dapat diartikan sebagai pemindahan dari suatu tempat kepada tempat yang lain (Al-Jaziri, n.d.). Dari definisi tersebut terdapat dua kategori, yaitu memindahkan sesuatu yang bersifat kebendaan (memindahkan

barang) dan juga memindahkan sesuatu yang bersifat tanggungan (memindahkan utang) (Mubarok & Hasanudin, 2017). Adapun terkait hal ini, *hiwalah* cenderung kepada akad memindahkan utang. Sedangkan secara istilah, *hiwalah* dimaknai sebagai suatu akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang (*madin*) kepada pihak lain (penanggung) terhadap utang yang sama sehingga pihak pertama (*madin*) terbebas dari kewajiban membayar utang (Al-Nawawi, n.d.).

Akad *hiwalah* diperbolehkan untuk dilakukan sebagaimana merujuk kepada hadits riwayat Bukhari dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Bersabda, “Menunda pembayaran utang bagi yang mampu adalah suatu kezaliman. Apabila (utang) seorang di antara kalian dialihkan kepada pihak yang mampu, maka hendaklah ia menerimanya (Abdurrahman, 2011). Sedangkan menurut *ijma'*, para ulama sepakat membolehkan akad *hiwalah*. Adapun akad *hiwalah* yang diperbolehkan adalah *hiwalah* atas utang yang tidak berbentuk barang melainkan *hiwalah* yang berbentuk utang. Karena *hiwalah* itu merupakan pemindahan utang (berupa uang atau kewajiban finansial) (Antonio, 2018).

Berkaitan dengan rukun *hiwalah*, menurut jumhur ulama terdiri dari: Pertama, *muhil* (pihak yang memiliki utang/*madin*). Kedua, *muhil* (pihak yang memberi utang/*da'in*/yang memiliki piutang). Ketiga, *muhil 'alaih* (pihak yang memiliki kewajiban melunasi utang *muhil* kepada *muhil*). Syarat ketiga subjek hukum tersebut adalah cakap hukum dan adanya keridaan dari para pihak. Keempat, *muhil bih/dain* (utang). Syarat dari utang atau objek akad itu adalah harus utang yang wajib dibayar, diketahui kualitas dan kuantitasnya dan sudah masuk jatuh tempo, dan kelima, *shigat (ijab qabuli)*. Syaratnya adalah harus sesuai yang diakadkan dan berada dalam satu majlis (Mubarok & Hasanudin, 2017).

Secara umum, akad *hiwalah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Syaikhu, Aryadi & Norwili 2015): Pertama, Akad *hiwalah Muayyadah*. *Hiwalah muqayyadah* artinya akad *hiwalah* yang bersifat terikat. Tiga subjek hukum memiliki keterikatan utang yang sama. Contoh, A (*muhil*) memiliki piutang kepada B (*muhil*) dan B (*muhil*) memiliki piutang kepada C (*muhil*). Utang (*muhil bih*) B kepada A jatuh tempo dan B tidak mampu membayarnya. Maka B meminta C (*muhil 'alaih*) untuk membayar utangnya A dan A menyetujuinya. Kedua, Akad *hiwalah muthlaqah*. Artinya, akad *hiwalah* yang mutlak. Contoh, A (*muhil*) memiliki piutang kepada B (*muhil*). Utang (*muhil bih*) B kepada A jatuh tempo dan B tidak mampu membayarnya. Maka B meminta C (*muhil 'alaih*) untuk

membayar utangnya ke A dan A menyetujuinya (utang piutang yang terjadi hanya dua pihak).

Di bank syariah, akad *hiwalah muthlaqah* ini menjadi skema terjadinya akad *hiwalah bi al-ujrah*. Sehingga kedudukan bank syariah adalah sebagai *muhal 'alaih*. Atas jasanya itu bank syariah mendapatkan *ujrah*. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait akad *hiwalah bi al-ujrah* ini. Pendapat ulama yang melarang, antara lain: Juhur ulama berpendapat bahwa kesepakatan mengenai *ujrah* atas jasa *hiwalah* termasuk *riba (qardh)*, sehingga haram hukumnya. Pendapat ulama yang membolehkan, antara lain (Mubarak & Hasanudin, 2017).

Pertama, Menurut Mushthafa' Abdullah Al-Himsyari yang dikutip oleh Syaikh 'Athiyah Shaqr dalam kitab *ahsan al-kalam fi al-fatwa wa al-ahkam* memaparkan bahwa *ujrah* atas jasa *hiwalah*, disandarkan kepada *ujrah* atas jasa *jah (dignity, kewibawaan)* dan *ujrah* atas *natijah* (prestasi) dalam akad *ju'alah* yang menurut mazhab syafii dibolehkan mengambil *ujrah* atas jasa tersebut. Kedua, Menurut pendapat sejumlah ulama dalam kitab *al-mausu'ah al- 'ilmiyyah li al-bunuk al-Islamiyyah* yang dikutip Jaih Mubarak menyatakan bahwa sejumlah ulama yang membolehkan adanya *ujrah* atau *ju' l* atas jasa penjaminan sebagaimana bolehnya mengambil *ujrah* atas jasa keagamaan (*tabarru' atau ibadah*). Ketiga, Menurut Baqir Shadr dalam kitab *al-bunuk al-laribawi fi al-Islam* yang juga dikutip Jaih Mubarak menyatakan bolehnya mengambil *ujrah* atas jasa *hiwalah*.

Kebolehan akad *hiwalah bi al-ujrah* dapat disamakan dengan alasan ulama yang membolehkan akad *kafalah bi al-ujrah* yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, yaitu Pertama, terbentuknya dua keadaan yang saling bertolakbelakang, mengenai penjamin (*kafil*) yang bersedia memberikan jaminan kepada *ashil* dengan syarat ia berhak menerima *ujrah*. Di satu sisi *ashil* ini, tidak menemukan *kafil* yang mensyaratkan adanya *ujrah* sedangkan *ashil* sangat membutuhkan *kafil* dalam menjamin dirinya (Nurjaman & Witro, 2021). Maka atas dasar adanya kebutuhan nyata (*al-hajjah/al-dharurah*) itulah *kafalah bi al-ujrah* boleh dilakukan. Hal itu berlaku juga bagi *muhil* yang sulit mendapatkan *muhal 'alaih* tanpa adanya syarat *ujrah*. Kedua, adanya Qiyas yang membolehkan menerima *ujrah* dari jasa keagamaan. Akad *hiwalah* bagian dari akad *tabarru'* dalam rangka menolong sesama. Menolong atas dasar kebajikan dan taqwa bagian dari ibadah sosial. Maka akad *hiwalah* yang mengambil *ujrah* atasnya,

dibolehkan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat pustaka, dengan pendekatan yuridis normatif melalui penggunaan sumber data yang diperoleh secara langsung melalui berbagai literasi, seperti peraturan perundang-undangan, fatwa ulama, artikel ilmiah, buku dan berbagai literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan teknik analisis data dalam beberapa langkah yaitu mereduksi data dan mengerucutkannya, menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan memberikan kesimpulan. Dengan demikian, penulis akan menganalisis objek penelitian dengan mengujinya dari berbagai sudut pandang. Kemudian memberikan gambaran yang komprehensif menjadi satu kesatuan yang terintegrasi berupa data yang faktual berupa keterangan dan penjelasan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Result Penerapan Akad *Wakalah bi al-Ujrah* di Perbankan Syariah

Transpormasi akad *wakalah bi al-ujrah* dari akad *tabarru'* menjadi akad *mu'awadhat* memiliki pengaruh kepada penggunaan akad tersebut di perbankan syariah. Merujuk kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 113 tahun 2017 tentang Akad *Wakalah bi Al-ujrah* terdapat ketentuan khusus dalam kegiatan produk yang menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*. Beberapa produk yang disebutkan dalam substansi fatwa hanya beberapa produk yang banyak digunakan di perbankan syariah, sebagian produk banyak digunakan di LKS non-perbankan. Selain itu juga, melihat fatwa DSN yang lain banyak juga penerapan akad *wakalah bi al-ujrah* dalam pengembangan produk di bank syariah. Adapun penerapan akad *wakalah bi al-ujrah* diperbankan syariah dirangkum dalam beberapa produk, antara lain:

a) Produk *Letter of Credit Impor dan Ekspor (L/C) Syariah*

L/C merupakan surat pernyataan akan membayar kepada yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan Ekspor ataupun Impor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah (Hakim, Sobarna & Solihatin, 2020). Contoh, PT. Harmoni merupakan perusahaan importir Ikan hias. PT. Harmoni ini melakukan pemesanan 3

kontainer dari Jepang. Pihak Jepang baru akan menyetujui pengiriman 3 kontainer ikan hias, ketika PT. Harmoni menerbitkan L/C dari bank yang dianggap terpercaya. PT. Harmoni menerbitkan L/C di bank syariah dengan memberikan jaminan pembayaran berupa sertifikat kepemilikan Apartemen (Maulana, 2020).

Berdasarkan contoh di atas, telah terjadi akad *wakalah bi al-ujrah* ketika PT. Harmoni memberikan kuasa kepada bank syariah untuk bertindak menjadi *wakil* dalam memberikan jaminan pemenuhan pembayaran utang PT. Harmoni atas pemesanan ikan hias dari Jepang. Atas jasanya tersebut, bank Syariah berhak mendapatkan *ujrah*. Adapun kedudukan bank syariah hanya sebagai *wakil* maka untuk membayar utangnya, nasabah terlebih dahulu harus memiliki dana di bank syariah sesuai dengan jumlah utang pemesanan. Apabila nasabah tidak memiliki dana yang sama besarnya dengan jumlah utangnya maka terdapat beberapa alternatif akad (Suhendar, 2020) yaitu Pertama, multi akad antara akad *wakalah bial-ujrah* dengan akad *qardh*. Bank syariah tetap menjadi *wakil* mengurus administrasi kepentingan kegiatan impor sekaligus memberi dana talangan kepada nasabah untuk membayar utangnya. *Ujrah* tetap berasal dari akad *wakalah bi al-ujrah* bukan dari akad *qardh*. Kedua, multi akad antara akad *wakalah bi al-ujrah* dengan akad *mudharabah*.

Bank syariah tetap menjadi *wakil* dalam kelancaran administrasi sekaligus memberi talangan dana kepada nasabah sebesar jumlah utangnya ke penjual. Secara tidak langsung bank syariah berkedudukan sebagai *shohibul mal* dan nasabah sebagai *mudhorib*. Maka keuntungan bank syariah berasal dari *ujrah* sebagai *wakil* nasabah dan bagi hasil atas akad *mudharabah*. Ketiga, multi akad antara akad *wakalah bi al-ujrah* dengan akad *hiwalah*. Bank syariah tetap menjadi *wakil* dalam urusan administrasi sekaligus melakukan pembayaran kewajiban nasabah, sehingga utang nasabah importir kepada eksportir beralih kepada bank syariah.

Dalam L/C ekspor pun memiliki kesamaan akad yang digunakan seperti dalam L/C Impor. Dengan menukar kedudukan contoh di atas, bahwa Importir dari Jepang memesan tiga kontainer ikan hias kepada PT. Harmoni di Indonesia. Maka PT. Harmoni memiliki bukti L/C Importir Jepang. Bukti L/C itu dijadikan syarat pembiayaan L/C ekspor kepada bank syariah. Akad yang dapat terjadi antara lain (Widyastuti, 2019): Pertama, akad *wakalah bi al-ujrah*, yaitu antara eksportir sebagai pemberi kuasa dan bank syariah

sebagai *wakil*. Bank syariah mengurus dokumen ekspor dan bank syariah menagih piutang milik eksportir kepada bank penerbit L/C. Atas jasanya bank syariah berhak mendapatkan *ujrah*.

Kedua, multi akad antara akad *wakalah bi al-ujrah* dengan akad *qardh*. Bank syariah sebagai *wakil* melakukan pengurusan dokumen ekspor dan melakukan penagihan kepada bank penerbit L/C. Bank syariah juga memberikan dana talangan kepada nasabah eksportir sebesar jumlah piutang pembeli. Dana talangan itu, dibayar dengan hasil penagihan kepada bank penerbit L/C. Atas jasanya bank syariah berhak mendapatkan *ujrah*. DSN-MUI menetapkan fatwa tersendiri mengenai penyelesaian piutang ekspor dengan skema akad ini, karena skema akad ini banyak dilakukan di lapangan.

Ketiga, multi akad antara akad *wakalah bi al-ujrah* dengan akad *mudharabah*. Bank syariah memberikan dana pengganti atas biaya produksi eksportir dalam menyediakan barang pesanan, mengurus dokumen ekspor dan melakukan penagihan kepada bank penerbit L/C. Atas jasanya bank syariah berhak mendapat *ujrah* sekaligus bagi hasil atas akad *mudharabah* yang dilakukan.

b) Produk Anjak Piutang Syariah

Produk anjak piutang syariah merupakan produk mengalihkan penyelesaian pembayaran piutang dari pihak berpiutang kepada pihak lain yang bersedia untuk menagih piutangnya kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk sesuai dengan prinsip syariah (DSN-MUI, 2020). Contoh, perusahaan dealer motor mengajukan pembiayaan anjak piutang ke bank syariah atas penagihan piutang kepada pembeli dalam jangka waktu tiga tahun. Hal itu dilakukan untuk mengembalikan modalnya. Sehingga bank syariah menjadi *wakil* dari perusahaan dealer untuk menagih utang pembeli. Apabila bank syariah menalangi utang pembeli kepada dealer, maka utang pembeli kepada perusahaan dealer dilunasi oleh bank syariah dan atas dana talangan tersebut, dibayar oleh perusahaan dealer kepada bank syariah melalui tagihan utang kepada pembeli. Atas jasa penagihan tersebut bank syariah berhak mendapatkan *ujrah* dari perusahaan dealer.

Terdapat skema multi akad dalam contoh di atas, antara lain (Edwin & Aprianto, 2017): Pertama, akad *wakalah bi al-ujrah* dilakukan antara pihak yang memiliki piutang dengan bank syariah sebagai *wakil* pihak berpiutang untuk melakukan penagihan kepada pihak yang berutang. Kedua akad *qardh* terjadi apabila pihak bank syariah sebagai *wakil*

menalangi pembayaran utang pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Sehingga pembayaran atas dana talangan tersebut dibayar atas penagihan terhadap pihak yang berutang atau pihak yang diperintahkan membayar utang pihak yang berutang. Melalui skema produk anjak piutang ini, akad *wakalah bi al-ujrah* memiliki kedudukan sebagai akad *accessoir* (akad turunan). Karena lahir dari utang piutang antara perusahaan dealer dengan pembeli. Namun melihat produk anjak piutang yang mengambil keuntungan atas *ujrah* tersebut. Maka kedudukan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagai akad inti dari produk anjak piutang syariah.

c) **Produk Pembiayaan Sindikasi**

Pembiayaan sindikasi merupakan akad antara beberapa lembaga keuangan, baik antar LKS atau antara LKS dan LKK, dalam rangka melakukan pembiayaan terhadap proyek tertentu. Pembiayaan sindikasi yang dilakukan bank syariah merupakan salah satu strategi masuknya bank syariah kedalam usaha korporasi yang menguntungkan (Rahmayanti, 2019). Dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor 91 tahun 2014 tentang pembiayaan sindikasi, terdapat banyak penggunaan akad di dalamnya. Salah satu akad antara peserta sindikasi, selain pakai akad *mudharabah* dan *musyarakah* juga dapat memakai akad *wakalah bi al-ujrah*. Bank syariah (peserta) berkedudukan sebagai *wakil* atas *muwakkil (leader)* dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah (DSN-MUI, 2020).

4.2 **Penerapan Akad *Hiwalah bi al-Ujrah* di Perbankan Syariah**

Berdasarkan analisis fatwa DSN-MUI, penerapan akad *hiwalah bi al-ujrah* juga banyak digunakan dalam pengembangan produk di LKS. Adapun di perbankan syariah terdapat dalam dua produk yaitu:

a) **Produk Penyelesaian Utang dalam Import**

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 61 tahun 2007 tentang penyelesaian utang dalam impor menyatakan bahwa ketika nasabah/importir yang tidak memiliki dana di bank syariah sebesar harga pembelian barang dari pihak eksportir (DSN-MUI, 2020). Maka sebagaimana dijelaskan di atas, beberapa jalan alternatifnya adalah menggunakan skema akad *wakalah bi al-ujrah* dengan akad *qardh* dan juga skema akad *wakalah bi al-ujrah* dengan akad *hiwalah*. Sehingga skema multi akad dalam dua alternatif tersebut secara

hakikat menggunakan skema akad *hiwalah bi al-ujrah*.

Dalam skema multi akad *wakalah bi al-ujrah* dengan akad *qardh*. Kedudukan bank syariah sebagai *muhāl 'alaih* yaitu sebagai pihak yang membayar utang nasabah/importir (*muhil*) kepada penjual/eksportir (*muhāl*). Sehingga utang nasabah/importir kepada penjual/eksportir lunas dan beralih kepada bank syariah. Atas jasanya itu bank syariah berhak mendapatkan *ujrah*. Begitupun dalam skema multi akad *wakalah bi al-ujrah* dengan akad *hiwalah*. Selain itu juga, dalam skema produk anjak piutang syariah yang menggunakan multi akad *wakalah bi al-ujrah* dengan akad *qardh* secara hakikat memiliki kedudukan sebagai akad *hiwalah bi al-ujrah* dari segi adanya pengalihan utang.

b) Produk Pengalihan Utang Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah

Penggunaan akad *hiwalah bi al-ujrah* dalam substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 90 tahun 2013 tentang pengalihan pembiayaan *murabahah* antar LKS merupakan alternatif dari sekian akad yang dapat dipilih (DSN-MUI, 2020). Sehingga ketika nasabah memiliki utang kepada bank syariah atas pengajuan pembiayaan *murabahah* dalam kepemilikan modal kerja. Kemudian nasabah memiliki keinginan untuk mengalihkan utangnya kepada bank syariah lain. Maka skema yang dapat dipilih adalah akad *hiwalah bi al-ujrah*. Bank syariah yang dipilih memberikan dana talangan kepada nasabah sebesar utangnya, kemudian membayarkannya kepada bank syariah pemberi pembiayaan *murabahah*. Sehingga atas pengalihan utang tersebut, utang nasabah berpindah kepada bank syariah yang dipilih dan bank syariah yang dipilih berhak mendapatkan *ujrah* dari nasabah. Skema pengalihan utang ini tentunya disepakati para pihak dengan ketentuan yang jelas.

4.3 Hakikat Kedudukan Akad Wakalah bi al-Ujrah dan Akad Hiwalah bi al-Ujrah dalam Pengembangan Produk di Perbankan Syariah

Apabila melihat penerapan akad *wakalah bi al-ujrah* dengan akad *hiwalah bi al-ujrah* dalam beberapa produk bank syariah di atas. Maka kedudukan kedua akad tersebut lahir karena akad lain. Artinya, kedua akad tersebut berasal dari akad *qardh* yang berasal dari akad jual beli yang dilakukan secara tidak tunai. Misalnya dalam produk L/C Impor

maupun Ekspor. Adanya akad *wakalah bi al-ujrah* karena transaksi yang tidak dilakukan secara tunai atau mekanisme transaksi jual beli antara eksportir dan importir yang membuat mekanisme lahirnya akad *wakalah bi al-ujrah*. Dalam produk anjak piutang syariah pun sama berasal dari perusahaan dealer yang memiliki piutang pembelian kendaraan terhadap pembeli yang melakukan transaksi kepemilikan kendaraan secara tidak tunai. Begitupun dalam produk yang menggunakan akad *hiwalah bi al-ujrah*. Adapun apabila melihat penerapan dalam produknya, kedua akad tersebut menjadikan bank syariah mendapatkan keuntungan sehingga dapat dikatakan sebagai akad inti.

Pengaplikasian akad *wakalah bi al-ujrah* dengan akad *hiwalah bi al-ujrah* dalam pengembangan produk di bank syariah, banyak digunakan dalam menjalankan mekanisme fungsi bank terhadap pemberian fasilitas pelayanan jasa. Walaupun penggunaannya dapat juga sebagai akad pelengkap dalam skema multi akad dalam mekanisme penyaluran dana melalui pembiayaan. Namun kedudukan kedua akad tersebut tetap berjalan sesuai porsi kedudukan sifat awalnya sebagai akad *tabarru'* yaitu tolong menolong atau membantu pihak lain tanpa digunakan untuk kegiatan komersil (Rafsanjani, 2016).

Kedudukan bank syariah dalam akad *wakalah bi al-ujrah* memiliki kedudukan sebagai *wakil* yaitu pihak yang mewakili *muwakkil* (nasabah) untuk melakukan perbuatan hukum yang diwakilkan kepadanya. Begitu juga dalam akad *hiwalah bi al-ujrah*, kedudukan bank syariah sebagai *muhil 'alaih* yaitu pihak yang memberikan kepastian hukum dalam membayar utang *muhil* (nasabah) kepada *muhil* (berpiutang). Atas jasa mewakili dan memberikan kepastian hukum terhadap keinginan nasabah untuk mendapatkan bantuan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo, maka pihak bank syariah berhak mendapatkan *ujrah*.

Ketika terdapat kata *ujrah* sebagai akibat dari adanya pertukaran manfaat berupa jasa seseorang, maka hal itu menunjukkan bahwa secara hakikat dalam pelaksanaan akad *wakalah bi al-ujrah* dan akad *hiwalah bi al-ujrah*, bank syariah menukarkan manfaat jasanya kepada nasabah. Sehingga perbuatan hukum yang dilakukan bank syariah sama halnya dengan perbuatan hukum melakukan akad *ijarah 'ala al-asykhash* (jual beli manfaat jasa). Selain itu juga, kata *ujrah* selalu identik dengan akad *ijarah*, karena *ujrah* bagian dari rukun *ijarah*. Apabila ditarik kepada akad *ijarah*, kedudukan bank syariah sebagai *ajir*, sedangkan nasabah sebagai *mu'jir*. Maka berlaku kaidah *fiqh fi al-muamalah*

yang berkaitan dengan maksud dan tujuan yaitu:

"الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلأَلْفَافِ وَالْبَانِي"

"Yang menjadi patokan dalam akad adalah maksud dan maknanya bukan lafad atau susunan redaksinya" (Ramadhan, n.d.)

Adiwarman A. Karim dalam bukunya Bank Islam menyatakan bahwa secara hakikat akad *tabarru'* merupakan akad dalam melakukan kebaikan dalam rangka mengharapkan balasan dari Allah SWT. Hal itu menjadikan akad ini tidak dilakukan untuk tujuan mencari keuntungan semata. Konsekuensi logisnya adalah apabila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan secara komersil maka ia bukan lagi berkedudukan sebagai akad *tabarru'* melainkan akad *mu'awadhat* (Anwar, 2007). Adapun pemberlakuan konsekuensi mentranspormasikan akad *tabbaru'* menjadi akad *mu'awadhat* harus memperhatikan batasan dan ketentuan berdasarkan prinsip syariah.

Kemudian apabila melihat substansi fatwa DSN-MUI Nomor 113 tahun 2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*, yang dalam landasan yuridisnya DSN-MUI mengutip dan mencantumkan pendapat ulama dari kitab terkemuka mereka (*al-kutub al-mu'tabarah*). Terdapat pendapat Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa apabila *wakalah* dilakukan dengan adanya pemberian imbalan, maka hal itu hukumnya sama dengan akad *ijarah*. Secara tidak langsung, pelaksanaan akad *wakalah bi al-ujrah* dan akad *hiwalah bi al-ujrah* dalam pengembangan produk di bank syariah dilaksanakan berdasarkan substansi atau redaksi tertulis. Namun secara hakikat pelaksanaan kedua akad tersebut sebenarnya maksud dan tujuannya adalah melaksanakan akad *ijarah* berupa pelayanan jasa kepada nasabah. Sehingga keuntungan yang didapatkan dari kedua akad tersebut sama halnya keuntungan yang berasal dari akad *ijarah* sebagai akad inti perbankan syariah mendapatkan keuntungan.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Akad *wakalah bi al-ujrah* dan akad *hiwalah bi al-ujrah* dalam pengembangan produk di bank syariah diterapkan dalam beberapa produk pelayanan jasa. Kedudukannya sebagai akad *accessoir* (turunan), apabila dilihat dari lahirnya kedua akad tersebut. Artinya, kedua akad tersebut berasal dari akad pokoknya yaitu *qardh* (utang piutang) atas jual beli yang dilakukan secara tidak tunai. Adapun apabila melihat

kedudukannya dalam penerapan di sebuah produk, maka kedudukannya sebagai akad inti yang memiliki sifat *mu'awadhat* dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan akibat penggunaan kedua akad tersebut berupa norma hukum yang tercipta dalam bentuk pelayanan jasa yang adanya imbalan maka secara hakikat kedua akad tersebut sama halnya dengan akad *ijarah* jasa.

Berdasarkan fakta kesimpulan penelitian ini, maka perlu adanya penelaahan lebih lanjut berkaitan dengan kedudukan akad *wakalah bi al-ujrah* dan akad *hiwalah bi al-ujrah* dalam pengembangan produk di perbankan syariah. Menurut hasil penelitian bahwa kedua akad tersebut menjadi akad inti yang memiliki sifat *mu'awadhat* dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang diterapkan LKS dalam produk pelayanan jasa. Maka bagaimana apabila diterapkan dalam produk pembiayaan sebagai jantung berlangsungnya bisnis LKS dalam mempertemukan sektor riil dengan sektor keuangan. Hal itu juga menjadi sesuatu yang penting untuk dikaji dan dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Sehingga penerapan kedua akad tersebut jangkauannya lebih luas dalam menambah produk inovasi yang dikembangkan oleh LKS.

REFERENSI

- Abdurrahman, M. H. (2011). *Mausuah Ahadits Ahkam Al-Muamalah Al-Maliyyah*. Dar Al-Kautsar.
- Al-Jaziri, A. (n.d.). *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Daar Al-Fikr.
- Al-Maqdisi, I. Q. (1998). *Al-Mughni*. Dar 'Alamil Kutub.
- Al-Nawawi, M. (n.d.). *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Pustaka Azam.
- Al-Syaukani. (2001). *Nailul Authar: Himpunan Hadits-hadits Hukum*. Bina Ilmu.
- Antonio, M. S. (2018). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Dolgun, M. H., Mirakhor, A., & Ng, A. (2019). A proposal designed for calibrating the liquidity coverage ratio for Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 82–97. <https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2018-0033>
- DSN-MUI. (2020). *Himpunan Intisari Fatwa*. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Edwin, N & K. A. (2017). Anjak Piutang (Factoring) dalam Ekonomi Islam”, *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 95–110. <https://journal.islamicconomic.or.id/index.php/ijei/article/download/59/49>.
- Hakim, A, Sobarna, N & A. S. (2020). Praktek Wakalah dan Hiwalah dalam Ekonomi Islam: Perspektif Indonesia. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 68–84. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v1i2.171>
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Kholijah, S. (2020). Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 104. <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3122>

- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Kencana.
- Maulana, I. (2020). Aplikasi Akad Wakalah dalam Letter of Credit Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(2), 175-193.
- Mubarok, J & H. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*. Simbiosis Rekatama Media. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.117>.
- Mubarok, J & H. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*. Simbiosis Rekatama Media.
- Mubarok, J, & H. (2017b). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Simbiosis Rekatama Media.
- Nurjaman, M. I & D. Ayu. (2021). Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Syariah*, 9(2), 55–67. <https://doi.org/10.37812/al%20iqtishod.v9i2.245>.
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru' dalam Transaksi Bisnis. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(210–129). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/758>.
- Rahmayanti. (2019). Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 1(12), 1–16. <https://doi.org/10.24952/masharif.v7i1.1617>.
- Ramadhan, A. A. A. (n.d.). *Mausu'ah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Al-Munazzamah li Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Islamiyah wa Dauruha fi Taujih Al-Nuzum Al-Mu'asirah*. Dar Al- Amyan Al-Iskandariyyah.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. UIN-SU Press.
- Suhendar, M. (2020). Penerapan Hybrid Kontrak Pada Letter of Credit. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 111–121. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7865>.
- Syaikhu, Aryadi & N. (2015). *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. K-Media.
- Widyastuti, S. (2019). Akuntansi Produk Letter Of Credit (L/C) Berbasis Syariah: Studi Kasus Pada PT. Bank XYZ. *JIAFE: Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 5(1), 65–78. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe/article/view/1222>
- Witro, M. I. N. dan D. (2021). Transformasi akad tabarru' menjadi akad mu'awadhat ; analisis akad hiwalah dan akad kafalah di lembaga keuangan syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 6(2), 162–172. DOI: 10.24235/jm.v6i2.8748.
- Yozika, F. Al, & Khalifah, N. (2017). Pengembangan Inovasi Produk Keuangan Dan Perbankan Syariah Dalam Mempertahankan Dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 1(02), 100–107. <https://doi.org/10.29040/jie.v1i02.154>
- Yunus, M. (2019). Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah. *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 2(1), 87–102. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4473>.

